

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEKERASAN
BERBASIS GENDER *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF FEMINISME**

Azzahra Salsabilla

ABSTRAK

Komnas Perempuan mengumumkan bahwa kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi model baru dari kekerasan kepada perempuan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Indonesia. Beberapa diantaranya akibat dari terjerat dengan menggunakan UU ITE. UU ITE adalah kebijakan yang mengatur mengenai keamanan dunia siber, namun kemunculannya telah menjadi permasalahan karena merugikan korban KBGO khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa UU ITE tidak memiliki keberpihakan pada perempuan sehingga perempuan telah menjadi korban berlapis dalam penegakan UU ITE. Peneliti menggunakan *feminist policy analysis*, konsep KBGO, dan konsep kebijakan publik untuk menganalisis penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan postpositivisme dengan metode penelitian kualitatif dan studi kasus feminis. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan berupa wawancara mendalam bersama salah satu anggota dari Komnas Perempuan, SAFENet, dan dua anggota dari LBH APIK Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE telah menjadi alat untuk mengkriminalisasikan korban KBGO dan tidak memiliki keberpihakan terhadap korban KBGO. UU ITE juga tidak menganut nilai-nilai feminisme sehingga banyak perempuan yang dirugikan dengan UU ITE. UU ITE juga secara tidak langsung meningkatkan angka kasus KBGO. Dengan begitu, UU ITE telah memberikan dampak negatif yang sangat parah bagi korban KBGO yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: UU ITE, KBGO, Perempuan, Feminisme

**IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC INFORMATION AND
TRANSACTION LAWS AND ITS IMPACT ON ONLINE GENDER-BASED
VIOLENCE IN A FEMINISM PERSPECTIVE**

Azzahra Salsabilla

ABSTRACT

Komnas Perempuan announced that the case of Online Gender-Based Violence (OGBV) has become a new model of violence against women in the last three years in Indonesia. Some of them are the result of being ensnared by using the ITE Law. The ITE Law is a policy that regulates cyber security, but its emergence has become a problem because it is detrimental to victims of OGBV, especially women. This study aims to explain that the ITE Law does not take sides with women so that women have become multiple victims in the enforcement of the ITE Law. Researchers used feminist policy analysis, the concept of OGBV, and the concept of public policy to analyze the research. This research paradigm uses postpositivism with qualitative research methods and feminist case studies. The data collection technique that the researchers used was in-depth interviews with a member of Komnas Perempuan, SAFENet, and two members of LBH APIK Jakarta. The results of the study show that the ITE Law has become a tool to criminalize OGBV victims and does not take sides against OGBV victims. The ITE Law also does not adhere to feminist values so that many women are harmed by the ITE Law. The ITE Law also indirectly increases the number of OGBV cases. In this way, the ITE Law has had a very severe negative impact on victims of OGBV who should receive legal protection.

Keywords: *ITE Law, OGBV, Women, Feminism*